

**ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
SEKITAR TAMAN NASIONAL GANDANG DEWATA**  
*(Analysis of The Socio-Economic Conditions of The Communities Around Gandang  
Dewata National Park)*

Muhammad Sarif<sup>1\*</sup>, Yulsan Demma Semu<sup>2</sup> dan Medi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat  
Jl. Prof. Baharuddin Lopa Talumung Majene, Majene, 91412, Indonesia

Corresponding author: [muhammadsarif@unsulbar.ac.id](mailto:muhammadsarif@unsulbar.ac.id)

**ABSTRACT**

*Gandang Dewata National Park was designated as a conservation area because it has biodiversity and a unique ecosystem. Ecosystem types in this area are based on altitude or topographic conditions, namely Lowland Forest, Lower Mountain Forest, Upper Mountain Forest and Sub-Alpine Forest. This research aims to obtain an explanation of the socio-economic problems of the community around the Gandang Dewata National Park (TNGD), the level of community dependence on the National Park area and the contribution of income from the park to the total income of farmers. The research was carried out in Mamasa Regency in the TNGD Area, West Sulawesi Province. The method used in this research is interviews. Respondents in this study were chosen randomly. Data was analyzed descriptively qualitatively and quantitatively. The results of this research show that basic data and information regarding the socio-economic conditions of the people of Taupe Village, one of the TNGD buffer villages, shows that out of the 84 respondents interviewed, the socio-economic conditions of the people of Taupe Village work as farmers. 90% of this is because the village's irrigation conditions are still in good condition. The community is dependent on the area, namely 56% know the village boundaries and the location where the community lives is outside the area. Apart from that, the community's dependence on forests consists of rice fields and gardens. Utilization of forest products in the form of firewood, honey, aloes, bamboo, rattan and game products. Commodities based on agricultural, livestock, plantation and forestry products are coffee, cloves, cinnamon, patchouli, honey, cassava pork, aloes and broiler chicken. Most people (77%) do not know about TNGD*

**Keywords:** *social conditions, socio-economic, TNGD*

**ABSTRAK**

Taman Nasional Gandang Dewata ditunjuk menjadi kawasan konservasi karena memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang khas. Tipe ekosistem pada kawasan ini berdasarkan pada ketinggian tempat atau kondisi topografi, yaitu Hutan Dataran Rendah, Hutan Pegunungan Bawah, Hutan Pegunungan Atas dan Hutan Sub-Alpin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD), tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional dan kontribusi pendapatan taman terhadap total pendapatan petani. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mamasa Kawasan TNGD Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Responden dalam penelitian ini dipilih secara acak. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dan informasi dasar mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Taupe salah satu desa penyangga TNGD menunjukkan bahwa dari 84 responden yang diwawancarai, kondisi sosial ekonomi masyarakat Taupe Desa bekerja sebagai petani. 90% diantaranya karena kondisi irigasi desa yang masih baik. Ketergantungan masyarakat terhadap daerah yaitu 56% mengetahui batas desa dan lokasi tempat tinggal masyarakat berada di luar daerah. Selain itu ketergantungan masyarakat terhadap hutan terdiri dari sawah dan kebun. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu bakar, madu, gaharu, bambu, rotan dan hasil buruan.

Komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah kopi, cengkeh, kayu manis, nilam, madu, daging babi singkong, gaharu dan ayam broiler. Kebanyakan masyarakat (77%) belum mengetahui tentang TNGD.

**Kata kunci:** kondisi sosial, sosial ekonomi, TNGD

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata diselenggarakan oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*management authority*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sebagai salah satu Taman Nasional yang baru terbentuk dan menjadi Taman Nasional ke 53 dari 54 Taman Nasional di Indonesia, maka pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata memerlukan perhatian dan kerjasama berbagai pihak apalagi belum adanya kelembagaan atau pengelola tersendiri dan masih di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status (Manullang, 2021). Dampak terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar Tamana Nasional yang paling berpengaruh adalah sedang hal ini terlihat dengan meningkatnya peluang ekonomi seperti perdagangan, penginapan serta usaha transportasi. Pengembangan pariwisata tentu saja akan memberikan dampak terhadap kondisi sekitar pariwisata, baik berupa dampak positif seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan

masyarakat. Dampak negative dengan adanya Tamana Nasional ini seperti harga barang-barang pokok dan lokal meningkat dan biaya pembangunan sarana dan prasarana juga meningkat (Nindra *et al*,2021).

Persepsi masyarakat terhadap Taman Nasional masih tergolong sedang yang artinya masyarakat sekitar Taman Nasional menyadari bahwa sumber daya hayati hutan penting untuk menopang kehidupan, namun tidak memahami bagaimana cara mengelola sumber daya agar tersedia secara berkelanjutan (Daulay, 2017). Pendapat yang sama diungkapkan Dong (2021), sebagian besar penduduk sekitar Taman Nasional menyatakan Kesadaran yang rendah dari pembangunan Taman Nasional tetapi mereka tetap mendukung pembangunan Taman Nasional.

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi termasuk Taman Nasional sangat bergantung pada sikap dan dukungan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional (Kadir *et al*, 2012). Senada dengan penelitian lain menurut Zhang (2020), menekankan bahwa Taman Nasional memiliki potensi untuk mencapai tujuan konservasi, tetapi untuk memenuhinya diperlukan peningkatan rasa partisipasi di antara penduduk setempat yang menganggap dirinya tidak berpengaruh pada pengembangan Taman Nasional.

Tahun 2013 Gubernur Sulawesi Barat mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan perihal Permohonan Pembentukan dan Deklarasi Taman Nasional Ganda Dewata. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat

terbit pada tahun 2014. Pada tahun 2016 terbitlah Keputusan Menteri LHK RI Nomor : SK. 773/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/10/2016 Tgl 3 Oktober 2016 Tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Seluas 189.208,17 Hektar.

Taman Nasional Gandang Dewata ditunjuk menjadi kawasan konservasi karena memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang khas. Tipe ekosistem pada kawasan ini berdasarkan pada ketinggian tempat atau kondisi topografi, yaitu Hutan Dataran Rendah, Hutan Pegunungan Bawah, Hutan Pegunungan Atas dan Hutan Sub-Alpin. Selain itu, terdapat jenis fauna yang endemik sulawesi seperti anoa, kuskus, musang sulawesi, dan rangkong. Untuk jenis flora antara lain: anggrek, nyatoh, eboni, damar, dan nepenthes.

Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sehubungan adanya penunjukkan kawasan (TNGD) adalah terkait pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dalam kawasan (TNGD). Masyarakat selama ini memanfaatkan SDA dalam kawasan (TNGD) untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan bertani (sawah dan kebun), memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan dan nira aren). Kebun masyarakat dalam kawasan (TNGD) di Kabupaten Mamasa umumnya ditanami dengan tanaman semusim (jagung dan padi) serta tanaman tahunan (kakao dan kopi). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai problem sosial ekonomi masyarakat sekitar (TNGD), tingkat ketergantungan

masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional dan kontribusi pendapatan dari tamanan terhadap total pendapatan petani.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023 hingga November 2023 di Kabupaten Mamasa pada Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata, Propinsi Sulawesi Barat. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, peta kawasan, GPS dan kusioner. Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yakni suatu teknik yang digunakan peneliti dalam mengambil informasi dalam penelitian, guna sebagai pembuktian konkrit atas jawaban fenomena tertentu yang ada di lingkungan sekitar. Teknik pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini adalah Teknik survei yaitu teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Metode ini juga dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau berlangsung.

Penggunaan metode survei ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai problem sosial ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD), tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional dan kontribusi pendapatan dari tamanan terhadap total pendapatan petani. Responden dalam penelitian ini terdapat 84 responden dan masing-masing merupakan perwakilan dari 579 total keseluruhan Kepala Keluarga dari masing-masing Dusun Kumbang, Dusun Ne'ke, Dusun Kanan,

Dusun Pa'la dan Dusun Rante yang dipilih secara acak.

## 2. Analisis data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai karakteristik masyarakat sekitar TNGD. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai problem sosial ekonomi masyarakat sekitar TNGD. Pendapatan masyarakat sekitar TNGD dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima dari kegiatan usahatani (di dalam dan di luar kawasan TNGD) dan pendapatan dari kegiatan non usahatani.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar TNGD diukur dengan

menggunakan kriteria kemiskinan untuk daerah pedesaan menurut Sayogyo (1990) dalam (Rahmawati, 2011) sebagai berikut:

- Miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun < 240 kg beras,
- Miskin apabila pendapatan perkapita per tahun 240 – 320 kg beras,
- Nyaris miskin apabila pendapatan per kapita per tahun 320 – 480 kg beras,
- Tidak miskin apabila pendapatan per kapita per tahun > 480 kg beras.

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan (\%)} = \frac{\text{Total pendapatan dari dalam TNGD}}{\text{Total Pendapatan Masyarakat}} \times 100 \%$$

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Sosial ekonomi masyarakat sekitar TNGD

Total keseluruhan jumlah Kepala Keluarga yakni sebanyak 579 orang diambil responden sebanyak 84 orang untuk mewakili masyarakat lainnya sebagai sumber informasi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, maupun

budaya masyarakat di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 79 orang (94,05%), sedangkan perempuan hanya 5 orang (5,95%). Tingkat pendidikan responden tingkat Sarjana 1%, SMA 17%, SMP 17%, SD 45%, dan tidak bersekolah 20%. Mata pencaharian responden didominasi oleh pekerjaan sebagai petani, sebanyak 76 orang (Gambar 1)



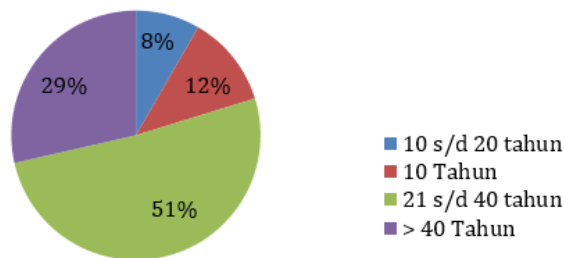
Gambar 1. Diagram Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan di Desa Taupe  
*Figure 1. Respondent Identity Diagram Based on Occupation in Taupe Village*

Menurut sejarah dan asal usul masyarakat ditetapkan 3 variabel untuk mengukur yakni lama bermukim, penduduk asli atau bukan dan alas hak (bukti kepemilikan lahan).

- Penduduk Berdasarkan Lama Bermukim  
 Dari total 84 responden masyarakat Desa Taupe untuk lama bermukim

terdapat 4 variabel yakni penduduk yang bermukim lebih dari 40 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 29%, bermukim 21-40 tahun sebanyak 43 orang (51%), 10-20 tahun 7 Orang (8%) sedangkan yang bermukim 10 tahun sebanyak 10 orang (12%).

**Penduduk Berdasarkan Lama Bermukim**

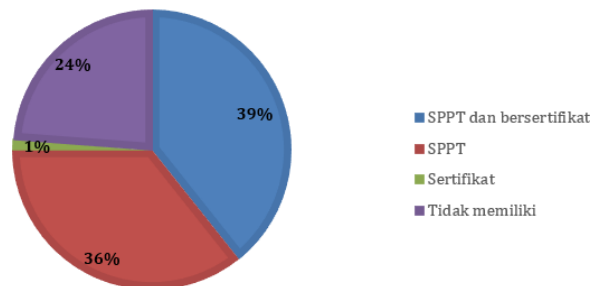


Gambar 2. Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Lama Bermukim di Desa Taupe  
*Figure 2. Diagram of Population Number Based on Length of Residence in Taupe Village*

- Penduduk Berdasarkan Status Asli Atau Pendetang  
 Keseluruhan total responden untuk masyarakat berdasarkan status bermukimnya terdapat 2 variabel penduduk asli sebanyak 67 orang dengan persentase 80% sedangkan pendatang sebanyak 17 orang dengan persentase 20%.
- Penduduk berdasarkan penggunaan lahan

Sebanyak 84 responden dari perwakilan masyarakat tiap dusun menggunakan lahan untuk keperluan permukiman, sawah, dan kebun dengan rincian masyarakat yang memiliki pegangan alas hak dalam menggunakan lahan sebanyak 33 orang yang memiliki SPPT dan bersertifikat dengan persentase 39%, masyarakat yang memiliki SPPT sebanyak 30 orang dengan persentase 36% (Gambar 3).

**Penggunaan Lahan**



Gambar 3. Diagram Penggunaan lahan  
*Figure 3. Land Use Diagram*

Akses hutan terhadap masyarakat dijabarkan dalam 4 variabel berupa pengetahuan batas desa, letak rumah masyarakat, akses ke hutan, dan persepsi terhadap kondisi hutan:

- Pengetahuan Tentang Batas Desa  
Hasil penelitian dengan masyarakat yang menjadi responden tiap perwakilan dusun, sebagian besar masyarakat telah mengetahui batas desa dengan jumlah 47 orang persentase sebesar 56% dibandingkan dengan yang belum mengetahui batas desa sebanyak 37 orang dengan persentase sebesar 44%. Hal ini dikarenakan dahulu masyarakat memang lebih banyak diperkenalkan mengenai batas-batas desa hingga batas antar dusun.
- Letak Rumah Masyarakat  
Untuk posisi/letak rumah masyarakat keseluruhan Desa Taupe terdapat di kawasan penyangga yakni di tepi hutan dan tidak terdapat di dalam kawasan hutan.
- Akses Jalan dari Rumah Ke Kawasan Hutan

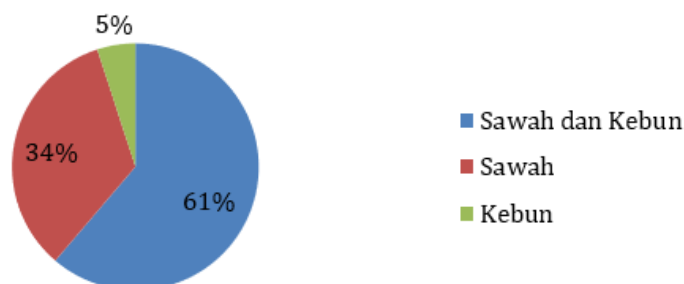
Secara umum masyarakat di Desa Taupe jalan aspal kemudian melalui jalan setapak dan jalan tanah hingga melewati beberapa sungai untuk sampai pada kawasan hutan.

- Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Hutan di sekitar Tempat Bermukim  
Data yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai kondisi hutan di sekitar tempat bermukim masyarakat di Desa Taupe menganggap kondisi Hutan Gandang Dewata masih sangat baik. Hal ini dikarenakan masyarakat paham pentingnya bersama-sama menjaga hutan untuk kelestarian agar terhindar dari bencana alam.

## 2. Ketergantungan Masyarakat

Ketergantungan masyarakat dijabarkan melalui 2 variabel yaitu ketergantungan kegiatan ekonomi dalam hal penggunaan lahan pertanian dan kegiatan ekonomi di bukan lahan pertanian, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**Penduduk Berdasarkan Ketergantungan Lahan**



Gambar 4. Diagram Persentasi Penduduk Berdasarkan Ketergantungan terhadap lahan di Desa Taupe

Figure 4. Diagram of Population Percentage Based on Dependence on Land in Taupe Village

Berdasarkan diagram persentase diatas bahwa jumlah ketergantungan penduduk berupa penggunaan lahan sawah dan kebun sebanyak 49 Orang (61%), penggunaan lahan sawah 27 Orang (34%), penggunaan lahan kebun sebanyak 4 orang (5%) dan sebanyak 4 orang tidak memiliki lahan merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh.

Luasan kelola lahan masyarakat akan dibagi dua bagian yakni Luasan Areal Kelola Lahan Pertanian dan Luasan Areal Kelola Bukan Lahan Pertanian. Luasan Areal Kelola Lahan Pertanian dikelompokkan berdasarkan luasan tertentu dengan kategori berikut :

- Kelompok 0-0,5 ha sebanyak 35 orang (42%)
- Kelompok 0,6-1 ha sebanyak 19 orang (21%)
- Kelompok >1 ha sebanyak 30 orang (34%)

Terdapat 5 orang tidak mengelola lahan yang pekerjaannya sebagai buruh tani, pengrajin dan bekerja di sektor swasta.

Areal kelola bukan lahan pertanian dikelompokkan berdasarkan luasan tertentu dengan kategori berikut :

- Luas 0-0.5 Ha sebanyak 38 orang (76%)
- Luas 0,6-1 ha sebanyak 10 orang (20%)
- Luas >1 ha sebanyak 2 Orang (4%)

Terdapat 34 orang (41%) tidak mengelola lahan non pertanian merupakan masyarakat yang hanya mengelola lahan pertanian.

Perladangan Berpindah akan dijabarkan dalam masyarakat bertani tanaman semusim dan komoditi unggulan pertanian. Penduduk yang bertani tanaman semusim sebanyak 78 orang (93%) dan masyarakat yang tidak bertanam semusim yakni 6 Orang (7%) yang tidak memiliki lahan atau bekerja sebagai buruh tani, peternakan dan lainnya. Komoditi pertanian yang dikelola terdiri dari tanaman padi sebanyak 74 orang, tanaman padi dan singkong sebanyak 1 orang sedangkan selebihnya sebanyak 9 orang tidak memiliki komoditi pertanian di karenakan masyarakat tersebut tidak bekerja pada sektor pertanian.

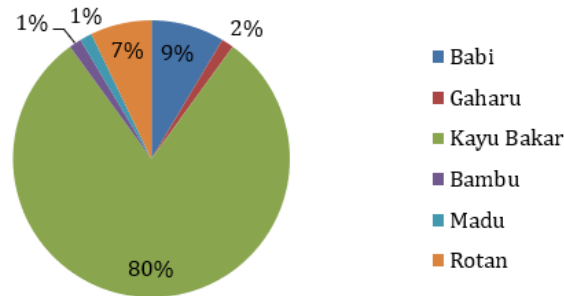
### **3. Manfaat/Fungsi Hutan**

Pemanfaatan masyarakat terhadap fungsi hutan dapat dijabarkan kedalam empat variabel yakni jenis hutan diusahakan, peruntukan hasil hutan, kecenderungan hasil pemanfaatan dan produktifitas.

#### **a. Jenis Hutan Yang Diusahakan**

Terdapat 6 variabel diantaranya kayu bakar merupakan hasil hutan yang paling banyak dimanfaatkan sebanyak 56 orang (80%) dan paling sedikit terdapat 1 orang (1%) memanfaatkan hasil hutan seperti gaharu, babi dan madu. Sedangkan masyarakat yang tidak memanfaatkan hasil hutan sejumlah 12 orang yang merupakan masyarakat yang bekerja hanya pada sektor pertanian (Gambar 5).

**Penduduk Berdasarkan Hasil Hutan Yang Dimanfaatkan**



Gambar 5. Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelolaan Hasil Hutan di Desa Taupe

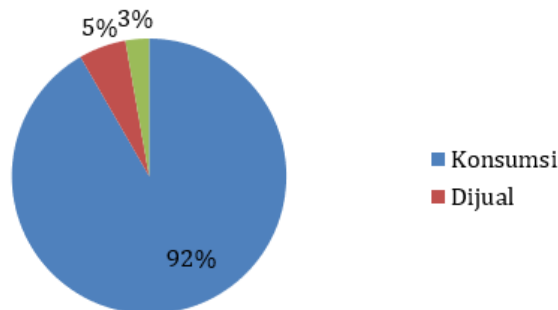
Figure 5. Diagram of Population Number Based on Forest Product Management in Taupe Village

**b. Peruntukan Hasil Hutan**

Jumlah penduduk berdasarkan empat variabel yakni peruntukan untuk konsumsi atau penggunaan pribadi yakni sebanyak 66 orang (92%), peruntukan untuk dijual sebanyak 4 orang (5%).

Hasil hutan yang dijual adalah madu, babi dan hasil buruan, untuk peruntukan dikonsumsi/dijual sebanyak 2 orang (3%) sedangkan masyarakat yang tidak memanfaatkan hasil hutan yakni sebanyak 12 orang (14%).

**Penduduk Berdasarkan Peruntukan Hasil Hutan**



Gambar 6. Diagram Persentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Peruntukan Hasil Hutan di Desa Taupe

Figure 6. Diagram of the Percentage of Population Based on Forest Product Allocation in Taupe Village

**c. Kecenderungan Hasil**

Kecenderungan hasil pemanfaatan hasil hutan yaitu mengalami penurunan sebanyak 17 orang (23%), kondisi stabil sebanyak 58 orang (77%) dan selebihnya 9 orang tidak memanfaatkan hasil hutan (tidak ada).

**d. Produktivitas**

Produktivitas masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan menunjukkan bahwa memanfaatkan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 67% dari total responden. Pemanfaatan hasil hutan tersebut hanya diperuntukan untuk

dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun terdapat juga beberapa masyarakat yang menjual hasil hutan yang didapatkan berupa hewan buruan, madu jenis trigona dan gaharu.

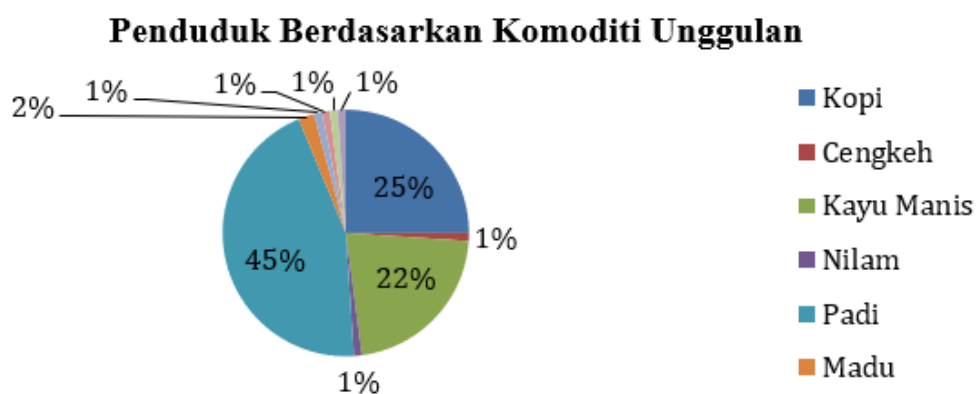
Frekuensi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan paling intens yakni setiap hari untuk jenis kayu bakar sedangkan pemanfaatan hasil hutan dengan berburu hanya 1 kali setahun. Masyarakat lebih banyak mengelola lahan pertanian karena kondisi pengairan yang produktif hingga 2-3 kali panen setiap tahunnya.

Rata-rata volume hasil hutan berupa kayu bakar yang dimanfaatkan sebanyak 150 kg per bulan. Hasil hutan yang dimanfaatkan untuk dijual berupa madu dan ternak. Madu dijual 4 kali dalam

setahun dengan volume rata-rata sebanyak 5 liter per penjualan. Sedangkan ternak hanya dijual sekali dalam setahun dengan volume rata-rata sebanyak 1 ekor ternak per tahun.

e. **Komoditi Unggulan Dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan**

Terdapat 10 jenis komoditi unggulan yang dikelola masyarakat yakni paling banyak ditunjukkan pada komoditi hasil pertanian yakni padi sebanyak 24 orang, kopi dan kayu manis sebanyak 21 orang dan paling sedikit sebanyak 1 orang yakni jenis komoditi babi, gaharu, ternak ayam potong dan cengkeh. Sedangkan terdapat 10 orang yang tidak memiliki komoditi unggulan karena karena tidak memiliki lahan dan pekerjaannya berada pada sektor swasta (Gambar 7).



Gambar 7. Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Komoditi Unggulan di Desa Taupe  
*Figure 7. Diagram of Population Number Based on Leading Commodities in Taupe Village*

### 5. Perspektif Tokoh Formal & Tokoh Informal

Untuk Perspektif tokoh masyarakat yang menjadi responden adalah kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi aktor kunci dalam pengetahuan akan masyarakat dan hubungannya dengan pekerjaan serta kawasan di sekitar wilayah Desa Taupe.

Sejarah kepemilikan lahan terdiri dari pengetahuan dan asal usul, hasil hutan, proses memperoleh hasil hutan, hukum adat, batas kepemilikan, dan situs sosial.

- Pengetahuan Tentang Masyarakat yang Tinggal/Menguasai Lahan di Areal Hutan  
 Saat ini masyarakat tidak tinggal dan mengelola lahan di dalam

kawasan hutan karena masyarakat sadar bahwa hal demikian akan memberikan dampak kerusakan terhadap tempat tinggalnya. Apabila tempat tinggalnya dianggap rusak maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat di kemudian hari.

- Sejarah Asal Usul Masyarakat Menurut Pengetahuan lokal

Pengetahuan lokal terkait sejarah asal usul masyarakat yang tinggal di lokasi lebih menjelaskan bahwa dulu pada saat penjajahan Belanda, Desa Taupe dan lainnya masih tergabung dan dikepalai oleh *Parengnge*. *Parengnge* merupakan pemimpin setingkat pemerintah kecamatan saat ini. Selain itu pada tahun 1990 semua orang yang berada di dalam hutan keluar karena pemerintah menyiapkan 150 unit rumah di luar kawasan.

- Jenis Hasil Hutan Yang Diusahakan Dari Cerita Nenek Moyang

Dulu masyarakat sering masuk dalam hutan untuk berburu babi, mengambil damar, rotan, kayu bakar, anoa dan berburu madu merang (*Trigona*). Namun saat ini masyarakat jarang masuk hutan, tetapi apabila masyarakat masuk hutan mereka masih mengambil tanaman obat dalam kawasan hutan dan rotan untuk kebutuhan pembuatan acara kematian dan lain-lain.

- Proses Masyarakat hingga dapat memperoleh hasil hutan menurut sejarah

Masyarakat dapat memperoleh hasil hutan dilakukan dengan cara pemotongan atau proses penyembelihan ayam terlebih dahulu. Namun saat ini kebiasaan itu tidak lagi dilakukan. Jika masyarakat ingin masuk ke dalam

hutan, langsung masuk saja tanpa ada lagi proses sebelumnya.

- Ada/Tidak Hukum Adat untuk masyarakat yang diberi hak kelola/hutan ataupun hasil hutan  
Tidak ada hukum adat yang mengatur masyarakat dalam mengelola hutan. Pengelolaan hutan masyarakat Desa Taupe lebih kepada seberapa besar tenaga untuk mengelola kawasan.

- Objek Tanda Batas Alam Kepemilikan Lahan/Kawasan Hutan  
Batas kepemilikan lahan yang digunakan adalah berupa patok-patok kayu. Selain itu, masyarakat juga menandai lokasinya dengan alam seperti pohon-pohon besar maupun batu.

- Situs Sosial dalam Kawasan Hutan  
Pada proses acara kematian masyarakat biasanya memukul gendang dan dari arah gunung Gandang Dewata akan terdengar juga suara gendang yang bergema. Masyarakat mempercayai bahwa suara tersebut merupakan Gendang dari Tuhan.

Informasi yang didapatkan mengenai interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan memang tidak terpisahkan karena telah menjadi kebutuhan serta lapangan pekerjaan beberapa masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Berikut beberapa penjelasan yang akan dirincikan berdasarkan variabel berikut:

- Mata Pencarian Masyarakat terhadap Kawasan

Beberapa masyarakat yang bermukim di tepi hutan memang menggantungkan hidupnya terhadap kawasan dan hal ini telah menjadi kegiatan turun temurun. Adapun model pengelolaan masyarakat

dengan bertani, berladang/berkebun.

- Sistem Ladang Berpindah  
Masyarakat tidak melakukan sistem ladang berpindah, karena semakin hari pertambahan masyarakat semakin banyak sehingga lahan yang biasanya dikelola semakin sempit.
- Hasil Pertanian/Ladang/Kebun  
Hasil pertanian, ladang ataupun kebun sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari terkadang hasil tersebut dijual bahkan saling berbagi untuk masyarakat lain yang membutuhkan.
- Jenis Komoditi dalam Kebun  
Beberapa jenis pohon yakni, kopi dan sayuran. Dan beberapa jenis buah-buahan serta terdapat pula tanaman obat-obatan dan semua ini hanya untuk keperluan pribadi dan tidak dikomersilkan. Masyarakat saat ini lebih beralih ke pertanian karena sudah bisa panen 2-3 kali karena irigasi pertanian dianggap baik.
- Perluasan Areal Kelola Masyarakat  
Pembahasan perluasan areal kerja sebenarnya harus melalui izin penjaga hutan terlebih dahulu dan hasil analisisnya melalui jenis dan jumlah kebutuhannya saja. Tetapi masyarakat sendiri memang tidak memperluas areal kerja karena mereka masing menganggap hutan perlu dijaga untuk masa depan generasi selanjutnya.
- Hasil Hutan yang dikelola masyarakat  
Hasil hutan yang dimaksud adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. Dahulu masyarakat memanfaatkan rotan, kopi dan beberapa tanaman obat-obatan untuk dikonsumsi pribadi. Selain itu

madu jenis Trigona kadang-kadang dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sosial ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Gandang Dewata**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kondisi sosial masyarakat berdasarkan tempat bermukim bahwa dari diagram 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak responden yang bermukim disekitar TNGD 24 responden yang bermukim lebih dari 40 tahun, bermukim 21-40 tahun sebanyak 43 responden, 10-20 tahun 7 responden dan 10 responden yang bermukim selama 10 tahun. Data yang didapatkan masyarakat di Desa Taupe menganggap kondisi Hutan Gandang Dewata masih sangat baik. Hal ini dikarenakan masyarakat paham pentingnya bersama-sama menjaga hutan untuk kelestarian agar terhindar dari bencana alam (Angin dan Sunimbar, 2020).

Masyarakat di tiap dusun menggunakan lahan untuk keperluan permukiman, sawah, dan kebun dengan rincian masyarakat yang memiliki pegangan alas hak dalam menggunakan lahan sebanyak 33 orang yang memiliki SPPT dan bersertifikat dengan persentase 39%, masyarakat yang memiliki SPPT sebanyak 30 orang dengan persentase 36%, masyarakat yang memiliki rinci sebanyak 1 orang dengan persentase 1% sedangkan tidak memiliki sama sekali alas hak yakni sebanyak 20 orang dengan persentase 24%, Konversi tersebut mayoritas terjadi pada kepadatan penduduk (Monsaputra, 2023).

Penggunaan lahan hutan oleh masyarakat merupakan salah satu dari faktor ketergantungan hutan (Nelson dkk, 2015). Berdasarkan hasil yang diperoleh dari ketergantungan pada

penggunaan lahan bahwa penggunaan lahan sawah dan kebun sebanyak 49 Orang (61%), penggunaan lahan sawah 27 Orang (34%), penggunaan lahan kebun sebanyak 4 orang (5%) dan sebanyak 4 orang tidak memiliki lahan merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh.

Penggunaan lahan sudah sesuai dengan pola ruang, baik yang berupa penggunaan lahan eksisting maupun yang masih belum terlaksana, sedangkan penggunaan lahan eksisting yang tidak sesuai hanya sebagian kecil (Dani *et al*, 2016). Berdasarkan diagram persentase hasil wawancara dilapangan menunjukkan luasan areal kelola lahan pertanian dengan penggunaan lahan berdasarkan kelompok 0-0.5 ha sebanyak 35 orang (42%), kelompok 0,6-1 ha sebanyak 19 orang (21%), kelompok >1 ha sebanyak 30 orang (34%) dan sebanyak 5 orang tidak mengelola lahan yang pekerjaannya sebagai buruh tani, pengrajin dan bekerja disektor swasta

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Taupe lebih banyak bekerja sebagai petani sebanyak 90% hal tersebut disebabkan kondisi pengairan desa masih dalam kondisi baik. Sebanyak 80 % responden merupakan penduduk asli dan 51% responden menetap di desa selama kurun waktu 21-40 tahun. Selain itu, berdasarkan kepemilikan bukti lahan terdapat tiga jenis alas hak yakni SPPT, sertifikat dan girik, sebanyak 39% memiliki SPPT dan sertifikat sedangkan 24% responden tidak memiliki alas hak.
2. Ketergantungan masyarakat dengan kawasan dapat dilihat bahwa terdapat 56% mengetahui batas desa

dan lokasi tempat tinggal masyarakat berada diluar kawasan. Menurut responden rata-rata menyatakan bahwa kondisi hutan masih dalam keadaan baik. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap hutan terdiri dari sawah dan kebun. Sebanyak 61% mengelolah sawah dan kebun. Luas lahan pertanian dan non pertanian rata-rata 0-0.5 ha sejumlah 42% dan 76%. Responden berdasarkan perladangan berpindah sebanyak 93% dengan komoditi yang diusahakan tanaman padi sejumlah 99% dan selebihnya singkong.

3. Kontribusi Taman Nasional terhadap pendapatan masyarakat berupa pemanfaatan hasil hutan berupa kayu bakar, madu, gaharu, bambu, rotan dan hasil buruan. Hasil hutan yang paling banyak dimanfaatkan adalah kayu bakar untuk keperluan sehari-hari sebanyak 78% dengan peruntukan hasil hutan tersebut di konsumsi 92% sedangkan kecenderungan hasil hutan yang dimanfaatkan cenderung stabil yakni 77%.

##### B. Saran

Perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar TNGD, baik dalam segi pertanian maupun dalam kegiatan yang lain seperti bidang peternakan, dan perdagangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada LP2M & PM Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan bantuan dana penelitian melalui dana DIPA Universitas Suulawesi Barat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada

Jurnal Nusa Sylva yang telah memberikan ruang kepada bagi penulis untuk publish pada jurnal ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adalina Y, (2015). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Vol 12, No 2. Hal 105-108.*
- Angin dan Sunimbar. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Dan Mengelola Mata Air di Desa Watowara, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. *Jurnal geoedusains, Volume 1, Nomor 1*
- Arikunto, Suharsimi, (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- BKSDA Sulawesi Selatan, (2018). Gema Gandang Dewata, Merintis Taman Nasional Gandang Dewata, Makassar.
- Dani *et al*, (2016). Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor. *Jurnal TATALOKA - Volume 19 Nomor 1*
- Daulay, (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. *Proceeding Biology Education Conference, Vol. 14, Hal 223-240.*
- Dong, (2021). Do Local Residents Support the Development of a National Park? A Study from Nanling National Park Based on Social Impact Assessment (SIA). *Journal LAND, 10, 1019.*
- Kadir *et al*, (2012). *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- LIPI Press, 2018. *Ekspedisi Sulawesi Barat Flora, Fauna dan Mikroorganisme Gandang Dewata*, Jakarta.
- Manullang, (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Teknologi. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara. Vol. 4 No. 1*
- Monsaputra, (2023). Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang. *Jurnal Tunas Agraria, 6 (1), 1 -11*
- Nelson dkk, (2015). Community's Forest Dependency and Its Effect Towards The Forest Resources and Wildlife Abundances in Sarawak, Malayasia. *International of Sustainable Development & World Ecology 22(5):401-412.*
- Nindra *et al*, (2021). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting Di Kelurahan Kumai Hulu Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Sylva Scientiae Vol. 04 No. 3*
- Zhang J, (2020). Socioeconomic Impacts of a Protected Area in China an Assesment from Rural Communities of Qianjiangyuan National Park Pilot. *Journal Land Use Policy, 99 (2020) 104849*